

MOBILITAS SOSIAL PESANTREN DI INDONESIA

Moh. Miftahusyain
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract

The birth of the Islamic boarding school in the middle of the community, have led this institution has a strong relationship with the community. In fact, often the interplay between boarding school with life and the surrounding environment exceeds the effect of the administrative area of the village or surrounding villages. human resource development for the students should refer to the needs of the community itself, because then the students will return to the community after they finish their studies, the return of the students is expected to be an agent of renewal (agent of change) and build community. At various pesantren in Indonesia, social mobility has happened quite a long time due to their boarding system integration with the public system followed by the developments taking place in the community. The integration of these two systems allows a community to access various economic resources of both. It certainly can be a cause of social mobility. The transition from being a profession of chaplain / counselor religion only later become professional workers such as employers, educators, politicians, and so is the most dominant cause of mobility in schools. Likewise, the development of community schools in terms of both economic and social development of the world of work and marriage among layers cause high mobility both vertically and horizontally. Social mobility in society is strongly influenced by the social system and values that exist therein. A society with a closed system, would not allow for social mobility can occur vertically or horizontal subsequently leading to the failure of a rearrangement in society.

Keywords: Mobility, Islamic boarding school

A. Latar Belakang

Dewasa ini, salah satu lembaga yang masih eksis dalam dunia pendidikan dan pemberdayaan di Indonesia adalah pesantren. Hal itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, dunia pesantren mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa, tidak terbatas dari periode tertentu dalam sejarah Islam. Martin Van Bruinessen mengistilahkan bahwa pesantren adalah untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu, (Bruinessen, 1992). *Kedua*, Pesantren merupakan tempat untuk mendidik calon-calon pemimpin di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya kebutuhan akan pesantren tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam realitasnya banyak di antara pemuka masyarakat adalah lulusan pesantren.

Lahirnya pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat, telah mengantarkan lembaga ini memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat. Bahkan seringkali saling

mempengaruhi antara pesantren dengan kehidupan dan lingkungan di sekitarnya melebihi pengaruh wilayah administratif kelurahan atau desa-desa sekitarnya.

Berkenaan dengan keterkaitan pesantren dan masyarakat sekitarnya, disebutkan oleh Suminto (Pradjarta, 1999) bahwa selain sebagai lembaga pendidikan, setidaknya pondok pesantren mempunyai dua fungsi utama, yaitu (1) Fungsi *Centre of excellence* yang menangani kader-kader pemikir agama, (2) Fungsi *Agent of development* yang menangani pembinaan pemimpin-pemimpin masyarakat. Dalam fungsinya yang pertama, pondok pesantren telah menghasilkan generasi-generasi ulama, baik ditingkat desa-kota maupun kalangan bawah, menengah dan atas. Sedangkan fungsi kedua, pondok pesantren telah banyak melahirkan alumni yang berkecimpung dalam berbagai kehidupan bahkan juga beberapa pemimpin nasional.

Peranan Pesantren dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dipandang potensial dan sangat menentukan. Masalah yang perlu dicermati adalah sudah sejauh mana pesantren mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri, dan profesional pada bidang yang ditekuni. Kualitas proses pesantren pada akhirnya akan ditentukan oleh relevansi output pesantren tersebut dengan kebutuhan masyarakat. Apabila output pesantren tidak dapat berperan dan diterima oleh masyarakat, maka kualitasnya tentu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini berarti di dalam kualitas proses pendidikan pesantren harus memperhitungkan pula apa yang merupakan kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya beberapa pesantren di Jawa mulai bersikap akomodatif dan pragmatis dengan mendirikan sekolah umum dan memberikan bekal ketrampilan bagi para santrinya, misalnya Pesantren Tebuireng di Jombang, Darul Ulum Rejoso Jombang, Pesantren Cipasung Tasikmalaya, dan lain-lain. Bahkan akhir-akhir ini, jumlah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal semakin bertambah.

Pendataan Pondok Pesantren tahun 2011-2012 berdasarkan analisis statistik pendidikan Islam berhasil mendata 27.230 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Lembaga Populasi Pondok Pesantren terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten yang berjumlah 78,60% dari jumlah seluruh Pondok Pesantren di Indonesia. Dengan rincian Jawa Barat 7.624 (28,00%), Jawa Timur 6.003 (22,05%), Jawa Tengah 4.276 (15,70%), dan Banten 3.500 (12,85%). Dari seluruh Pondok Pesantren yang ada, berdasarkan tipologi Pondok Pesantren, terdapat sebanyak 14.459 (53,10%) Pondok Pesantren Salafiyah, dan 7.727 (28,38%) Khalafiyah/Ashriyah, serta 5.044 (18,52%) sebagai Pondok Pesantren.

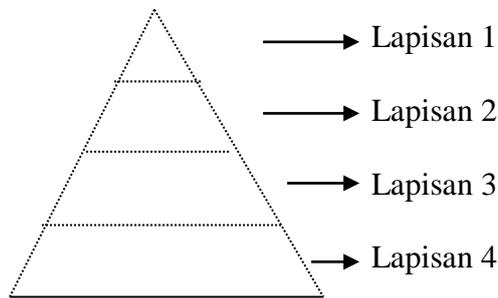
Dari Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) sejumlah 14.459, yang menyelenggarakan Program Wajar Dikdas 9 Tahun Tingkat Ula terdata berjumlah 1.324 lembaga dan PPs penyelenggara tingkat Wustha berjumlah 2.791 lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia.

Populasi Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula terbesar berada di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 341 lembaga (25,76 %), NTB 105 (7,93%), dan Jawa Barat 150 (11,33%) dari jumlah seluruh PPS Penyelenggara Wajar Dikdas 9 tahun tingkat Ula di Indonesia. Demikian pula populasi Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustha terbesar berada di provinsi Jawa Timur yang berjumlah 598 lembaga (21,43%), Jawa Barat 550 (19,71%) dan Jawa Tengah 331 (11,86%) dari seluruh PPS Penyelenggara Wajar Dikdas 9 tahun tingkat Wustha di Indonesia. Pondok Pesantren lebih banyak menyelenggarakan program Paket C, kemudian Paket B, dan terakhir Paket A. Pendataan tahun 2011-2012 mencatat sejumlah 263 lembaga pendidikan menyelenggarakan Paket A, 559 lembaga pendidikan menyelenggarakan Paket B dan 1.198 lembaga pendidikan menyelenggarakan Paket C.

Salah satu kritik yang sering muncul adalah pesantren dianggap telah keluar dari “khittah”nya untuk *tafaqquh fi al-din* yang merupakan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh para *funding fathers* pesantren. Terlepas dari kritik tersebut, kebijakan ini merupakan wujud dari dinamika pesantren dalam memposisikan dirinya sebagai sarana pemandu transformasi sosial dan kontekstualisasi ajaran Islam dalam tata kehidupan masyarakat (Qomar., 2007: 139). Lebih dari pada itu, hal demikian merupakan wujud dari tuntutan pesantren untuk: (1) tanggap terhadap perubahan sosiakultural dan tuntutan-tuntutan yang menyertainya, (2) meningkatkan kualitas dalam pelayanan program-program yang ditawarkan, dan (3) menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai idealism yang diembannya (Qomar, 2007: 139-140).

Jumlah pesantren di Indonesia berjumlah 27.230 buah (Kemenag RI, 2012) tersebut penting sebagai pijakan dalam menempatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki mobilitas tinggi dalam upayanya meningkatkan kualitas SDM, maka harus didukung dengan kemampuan lembaga membaca kebutuhan masyarakat disamping memperhatikan potensi atau bakat dan minat sumber daya manusianya. Oleh karena sistem pelapisan sosial itu berbentuk piramida (lihat Gambar 1), maka persaingan untuk naik tangga sosial itu menjadi cukup ketat. Dalam situasi demikian peran pesantren sebagai lembaga pendidikan sebagai sarana atau alat yang diperlukan dalam suatu mobilitas sosial menjadi penting adanya. Barang siapa yang berhasil dalam pendidikan termasuk di pesantren, dialah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk naik tangga sosial, (Adiwikarta, 1988).

Gambar 1. Sistem Pelapisan Sosial



Pencapaian hasil pendidikan yang baik pada suatu bidang keahlian lebih memungkinkan apabila didukung oleh bakat, bahkan dalam hal-hal tertentu peran bakat dapat lebih menonjol dari pada pendidikan, meskipun untuk mengembangkan bakat itu sendiri diperlukan jenis pendidikan tertentu. Orang berbakat tetapi tidak berpendidikan jarang yang bisa mencapai puncak tangga sosial dalam mobilitasnya.

Untuk dapat memperoleh relevansi atau mendekati relevansi pesantren dari kebutuhan masyarakat, selain daripada pesantren mengetahui kebutuhan masyarakat, juga masyarakat perlu didekatkan kepada pesantren. Berkaitan dengan masalah relevansi atau dalam istilah yang pernah populer dengan “*link and match*” adalah bagaimana memobilisasi dukungan masyarakat terhadap pengembangan pesantren. Suatu hal misalnya yang sangat sulit dewasa ini adalah mengenai pemujaan ijazah. Pemujaan ijazah dari sementara masyarakat dan orang tua telah membawa pesantren kepada usaha-usaha menjadikan pesantren sebagai “*diploma mill*”. Artinya pesantren terbawa oleh arus hanya sekedar untuk meluluskan para santrinya tanpa melihat apakah lulusannya tersebut berkualitas atau tidak. Selain dari pada itu keranjingan untuk memperoleh ijazah dari masyarakat telah menumbuhkan banyak pesantren yang menyediakan ijazah formal.

Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

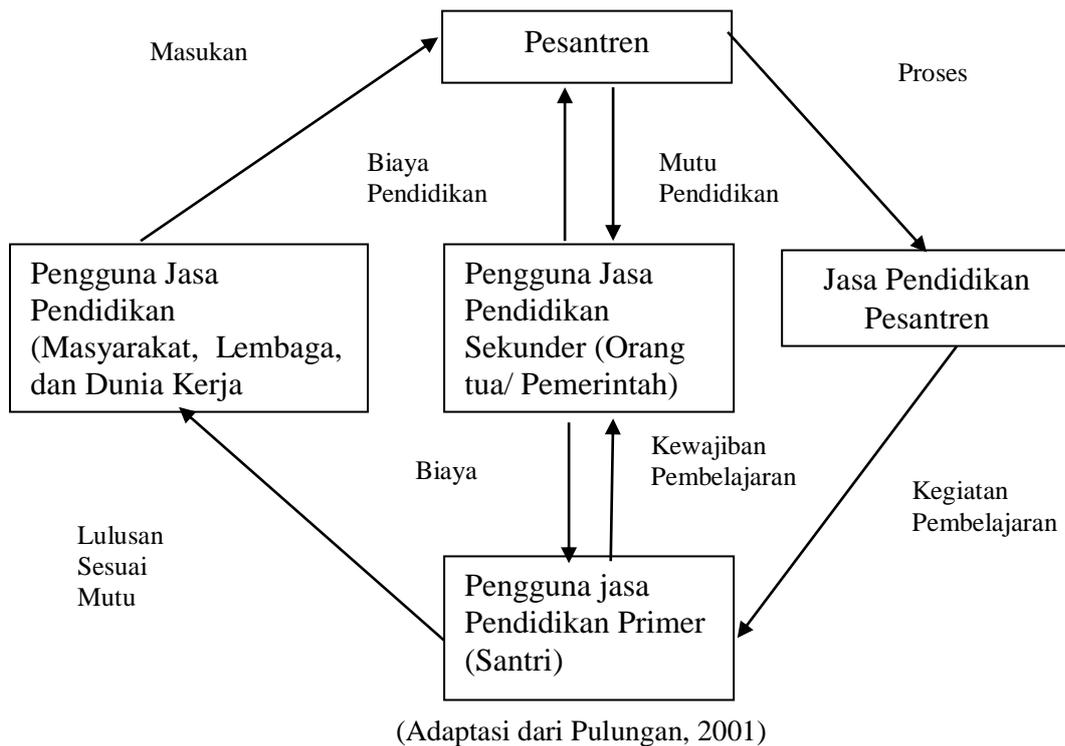
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pesantren harus juga memperhitungkan kemampuan untuk menjadikan lulusannya mampu melakukan mobilitas vertikal secara lebih luas dan terbuka, sehingga lulusan pesantren tidak hanya masuk pada wilayah spiritual dan politis, seperti kyai, da'i, ustadz, pengurus majlis taklim, guru agama, dan calon legislatif,

tetapi juga bisa masuk kepada semua jalur formal, seperti lingkungan pemerintahan, industri, dan keuangan. Masih banyak lulusan pesantren yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi yang relevan dengan bidang keahliannya.

Relevansi merupakan tingkat keterkaitan hasil/keluaran dengan tujuan institusi, keterkaitan antara berbagai komponen atau standar dan keterkaitan dengan tuntutan masyarakat nasional maupun global. Hal ini berarti pesantren harus selalu mampu membaca kebutuhan dan harapan *stakeholder*. *Stakeholder* pesantren terdiri dari berbagai macam yang salah satunya adalah pengguna lulusan (*users*) pesantren tersebut, yaitu masyarakat. Hubungan antara pesantren dengan masing-masing *stakeholder* tersebut saling berkelindan, artinya saling terkait antara satu dengan lainnya.

Dalam proses pembelajarannya, pesantren melaksanakan jasa pendidikan keagamaan yang ditujukan kepada santri sebagai pengguna jasa pendidikan primer harus memperhatikan mutu pendidikan. Sedangkan orang tua memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan tersebut. Proses pembelajaran akan menghantarkan santri memperoleh kompetensi yang disandangnya sebagai lulusan pesantren. Lulusan inilah yang akan diserap oleh masyarakat, lembaga, dan dunia kerja. Kualitas lulusan yang telah mengimplementasikan ilmunya pada masyarakat dan dunia kerja akan menunjukkan kemampuannya sesuai dengan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperolehnya ketika di pesantren, sehingga berhasil dan gagal nya lulusan tersebut itu mestinya dapat dijadikan sebagai masukan bagi pesantren dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran yang akan digunakannya.

Gambar 1: Hubungan antara pesantren dengan pelanggan



Berbagai pesantren di Indonesia juga tidak terlepas dari kondisi tersebut. Perkembangan yang cepat yang terjadi di masyarakat yang menjadi *stakeholder* pesantren dan faktor daya saing antar berbagai pesantren di Indonesia dalam rumpun ilmu yang sejenis mengharuskan pesantren untuk selalu menghasilkan lulusan yang bermutu yang selalu dapat diterima oleh *stakeholder* dalam jangkauan yang lebih luas.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka pengembangan sumber daya manusia bagi para santri harus merujuk pada kebutuhan masyarakat itu sendiri, karena nantinya para santri akan kembali ke masyarakat setelah selesai menuntut ilmu, kembalinya para santri inilah diharapkan akan menjadi agen pembaharuan (*agent of change*) dan membangun masyarakat. Predikat santri sebagai pembaharu sesuai dengan misi agama yang dibawa yaitu misi dakwah untuk menyeru kebaikan, menghilangkan kekufuran dan kemiskinan, sehingga pengembangan kualitas sumberdaya manusia sejalan dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan masa datang. Disinilah proses mobilitas sosial di pesantren dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Peran penting kyai dengan pesantrennya dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia sebagai agen perubahan adalah menanamkan sikap kejuangan pada para santrinya. Bahwa ilmu agama adalah ilmu ketrampilan yang telah dimiliki, dan wajib dikembangkan sesuai dengan misi dakwah dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat, sehingga motivasi

harus diinjeksikan kepada para santrinya. Dalam hal ini nampak bahwa motivasi ibadah akan memberikan semangat para santri menekuni ilmu dan ketrampilan, kemudian berusaha mengembangkan dan mengamalkan ilmu dan ketrampilan tersebut, sehingga akan terjadi proses perubahan sosial melalui pendidikan di lembaga pesantren.

B. Lulusan Pesantren dan Mobilitas Sosial Vertikal

Setiap kelompok sosial di masyarakat termasuk pada masyarakat pesantren telah tersusun secara teratur dalam struktur sosial, dimana dalam struktur tersebut akan senantiasa terjadi perubahan yang dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Perubahan dalam struktur itu didahului dengan proses gerak sosial dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lain atau dari satu fungsi tertentu ke fungsi lain tanpa ada perubahan status. Disisi lain, peralihan seseorang dari lapisan sosial yang rendah ke lapisan sosial yang lebih tinggi atau sebaliknya juga dapat terjadi, sebagaimana dipesantren seseorang mendapatkan status dan peran baru dengan tingkatan sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya atas dasar kemampuan atau keahlian yang dimiliki. Dua gerakan itu yang kemudian sebagai gerak vertikal dan horizontal masyarakat sebagai awal terjadinya mobilitas sosial (Soekanto, 2009: 244).

Pada mobilitas horizontal perubahan terjadi dari status yang satu ke status yang lain tanpa perubahan derajat karena berlangsung pada lapisan sosial yang sama. Sementara mobilitas vertikal adalah perubahan yang terjadi melampaui batas lapisan sosial, baik ke arah yang lebih tinggi atau ke arah yang lebih rendah, (Adiwikarta, 1988.)

Seperti istilah ‘kelas’ tersebut diatas, mobilitas sosial adalah suatu istilah yang amat dikenal oleh para ahli sosiologi, setidaknya ada tiga yang tampaknya perlu diadopsi dalam praktik sejarah; *pertama*, perbedaan antara pergerakan naik dan turun tangga sosial,. *Kedua*, adalah perbedaan antara mobilitas sepanjang kehidupan seseorang (dalam istilah sosiologi disebut ‘intragenerasional’) dan mobilitas yang mencakup beberapa generasi (‘intergenerasional’). *Ketiga*, adalah perbedaan antara mobilitas individu dan mobilitas kelompok. Sebagai contoh, para guru besar di Inggris, mendapat status yang lebih tinggi pada abad lalu dibanding sekarang. Sebaliknya, pada periode yang sama, kasta-kasta di India tampak semakin naik status sosialnya, (Burke, 2003).

Dalam masyarakat dengan ekonomi modern, mobilitas sosial vertikal itu merupakan kecenderungan atau gejala umum. Disana terdapat kesempatan untuk naik tangga atau ke lapisan sosial melalui suatu usaha, tetapi dapat juga turun ke lapisan yang lebih rendah. Jadi, status sosial memiliki keterkaitan dengan peran atau pola perilaku dan gaya hidup (life style)

tertentu. Dengan demikian perubahan status sosial ini diperlukan penguasaan akan hal-hal tersebut. Dengan perkataan lain, pendidikan dan pemberdayaan di pesantren merupakan salah satu alat atau sarana penting yang diperlukan dalam suatu mobilitas sosial, baik secara vertikal maupun horizontal.

Dengan berpijak pada klasifikasi di atas, dapat ditegaskan mobilitas sosial mengandung pengertian sebagai gerak sosial yang terjadi dalam struktur masyarakat, melihat pada pola-pola tertentu yang mengatur organisasi/lembaga atau kelompok. Gerak tersebut terjadi disebabkan oleh berbagai faktor dan akan merubah tatana struktur yang sebelumnya ada. Banyak implikasi yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak oleh proses tersebut, (Yuliati, Purnomo, 2003). Sebagai contoh, misalnya perkawinan seorang santri dengan anak kyainya tentu akan mengangkat keluarganya menjadi sejajar dengan keluarga barunya paling tidak jika ini terjadi maka akan mengangkat dirinya sendiri. Demikian juga jika banyak lulusan pesantren yang potensial dalam memasuki dunia kerja akan mempengaruhi struktur tenaga kerja dari kalangan pesantren di sektor publik. Dampaknya kekurangan tenaga kerja disektor publik akan menjadikan tenaga kerja dari kalangan pesantren menjadi mahal nilainya.

Pada berbagai pesantren di Indonesia, mobilitas sosial telah terjadi cukup lama akibat adanya integrasi sistem pesantren dengan sistem masyarakat diikuti dengan perkembangan yang terjadi dimasyarakat tersebut. Integrasi dua sistem ini memungkinkan sebuah masyarakat mengakses berbagai sumber ekonomi dari keduanya. Hal itu tentu dapat menjadi sebab terjadinya mobilitas sosial. Peralihan profesi dari menjadi ustadz/penyuluh agama saja kemudian menjadi tenaga kerja profesional seperti pengusaha, pendidik, politisi dan sebagainya merupakan sebab yang paling dominan dalam mobilitas di pesantren. Demikian juga perkembangan masyarakat pesantren baik dari segi ekonomi maupun sosial, perkembangan dunia kerja dan perkawinan antar lapisan menyebabkan mobilitas yang tinggi baik vertikal maupun horizontal.

Gerak sosial di masyarakat (termasuk di pesantren) yang berbentuk perpindahan dari lapisan sosial rendah ke lapisan sosial tinggi dan pembentukan kelompok baru yang mempunyai derajat lebih tinggi dari kelompok asal, dapat terjadi karena pernikahan, kerja individual, atau prestasi. Kemampuan kelas sosial rendah dalam memperoleh simbol kelas di atasnya yang merupakan tanda dari kelas sosial tinggi merupakan tanda utama, (Yuliati, Purnomo, 2003). Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini menyebabkan batas wilayah dan peluang dalam mengakses sumberdaya ekonomi, politik dan kekuasaan lebih dapat dengan mudah dijangkau lulusan pesantren.

C. Mobilitas Sosial Pesantren Dalam Pengembangan Masyarakat

Dalam hitungan matematis-ekonomis, pesantren dan masyarakat pedesaan adalah bagian yang dihitung miskin. Hal ini karena lingkungan pedesaan dikenal lambat dalam segi pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat desa dan pesantren perlu untuk diberdayakan secara berkelanjutan, meskipun kontribusi pesantren terhadap masyarakat cukup besar.

Dibalik penampilannya yang tergolong miskin, Masdar F. Mas'udi melihat, pesantren sesungguhnya mengantongi potensi yang cukup besar, khususnya dibidang ekonomi. Jika potensi itu tergali dengan optimal akan membawa hasil yang cukup bermanfaat.

Namun karena sebagian besar pesantren berada didaerah-daerah pedesaan dan termasuk golongan masyarakat bawah yang lemah secara ekonomi, maka hal itu berimbas pada terhambatnya pengembangan ekonomi pesantren. Selama ini pesantren telah berupaya untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki, misalnya dengan jalan program pengembangan SDM dan manajemen pesantren.

Sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan, pesantren juga mempunyai program pembinaan sosial dan ekonomi masyarakat. Kelanggengan program pesantren selama ini dipengaruhi oleh itikad masyarakat dan motivasi kiai dalam menjalankan syari'at agama. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor penting dalam proses mobilitas pesantren dalam pengembangan masyarakat.

Mobilitas sosial di masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem sosial dan tata nilai yang ada didalamnya. Sebuah masyarakat dengan sistem tertutup, tentu tidak memungkinkan untuk dapat terjadi mobilitas sosial antar lapisan maupun horisontal yang kemudian berdampak pada gagalnya suatu penataan ulang pada masyarakatnya. Akan tetapi jelas bahwa tidak dapat menata kembali masyarakat tanpa adanya perubahan yang cermat dalam cara berfikir yang telah mapan mengenai masyarakat itu sendiri. Masyarakat baru yang diinginkan, antara lain ialah suatu masyarakat yang akan memungkinkan orang lebih mampu melihat apa dan mengatakan apa sebenarnya diri serta dunia sosial mereka, (Gouldner, dalam Poloma 2000)

Menurut Mead dalam teori peran dan teori kelompok referensi lebih dipusatkan pada kajian organisasi, definisi-definisi, sikap-sikap, konsep diri individu yang bersifat internal dan (atau subyektif), dan organisasi-organisasi kelompok, institusi-institusi sosial dan masyarakat itu sendiri yang bersifat eksternal, keduanya saling berhubungan dan saling tergantung, karena baik organisasi internal maupun yang eksternal muncul dari "proses komunikasi simbol" dalam mobilitasnya. Hal inilah yang membedakan organisasi sosial dalam dunia manusia dari bentuk-bentuk organisasi sosial dalam dunia binatang (subhuman

world) yang ditemukan secara biologis. Dalam pandangan mengenai keluwesan (flexibility) respons manusia terhadap lingkungannya, perkembangan mengenai arti-arti dan sikap-sikap yang dimiliki bersama adalah penting untuk organisasi sosial. Individu harus menekankan proses pengambilan peran orang lain (tertentu dan pada umumnya), dan mengontrol perilaku mereka sendiri dalam cara yang sedemikian rupa sehingga cocok dengan kerangka yang ditentukan oleh definisi-definisi dan sikap-sikap bersama, (Johnson, 1986).

Singkatnya, organisasi sosial memperlihatkan intelegensi manusia dan pilihannya. Dengan munculnya intelegensi (atau kemampuan untuk menciptakan dan menggunakan simbol-simbol), individu-individu dapat melampaui (transcend) banyak batas yang muncul dari sifat biologisnya atau lingkungan fisik. Misalnya mereka dapat membangun pemukiman-pemukiman untuk melindungi diri dari perbedaan cuaca yang ekstrem sedemikian rupa, sehingga mereka dapat mendiami daerah-daerah yang kalau tidak begitu, tidak dapat dihuni. Mereka dapat mengatasi problem kehidupan dengan menciptakan berbagai media yang meringankan pekerjaan dan beban. Seperti menciptakan teknologi transportasi untuk mengatasi batas-batas jarak fisik, menciptakan mesin-mesin untuk mengangkat beban-beban yang tidak mungkin diangkat manusia, memelihara ternak dan tumbuh-tumbuhan untuk menjamin persediaan makanan dan peningkatan gizi.

Sikap-sikap ekonomis dan religius cenderung menjadi lebih universal. Sikap-sikap ekonomis cenderung ke universalitas karena setiap manusia dapat menjadi pembeli atau penjual; sikap-sikap religius ke universalitas karena kepercayaan agama yang mempersatukan semua orang didasarkan pada hakikat manusiawi atau hakekat spiritualnya yang sama. Sikap ekonomi itu akan lebih dangkal, sedangkan sikap religius menyentuh tingkat-tingkat identitas seseorang yang paling mendalam sebagai seorang manusia.

Melalui berfikir, manusia dapat menarik banyangan atau harapan masa depannya ke waktu sekarang. Dengan demikian tindakan sekarang dapat menjadi semacam tanggapan terhadap stimulus yang diharapkan dimasa datang dan bagian-bagian tindakan tertentu dapat direncanakan segera untuk masa yang akan datang. Berfikir tidak hanya dapat membawa orang ke masa datang, tetapi juga ke masa lalu. Dengan demikian meningkatkan efisiensi melebihi bertindak secara trial and error, (Ritzer, 2002).

D. Penutup

Berpijak dari pengembangan teori tersebut maka pengembangan masyarakat yang perlu dilakukan pesantren adalah upaya kolektif untuk mencari keseimbangan antara kesejahteraan individu dan masyarakat, yaitu kesejahteraan kolektif yang tidak mengalahkan

hak-hak individu dan perwujudan hak-hak individu dengan tidak merugikan masyarakat sebagaimana yang terjadi di masyarakat kapitalis murni. Dalam kaitannya dengan proses mobilitas di pesantren, lembaga ini harus membawakan konsep tauhid dalam wujud peranan untuk mengikuti sekaligus mengendalikan perubahan masyarakat pada batas-batas atau tingkatan yang diperkenankan agama. Hal ini sebenarnya, merupakan konseptualisasi dan aktualisasi dari tujuan teologi dalam Islam yaitu *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* dalam wujud mobilisasi yang dilakukan pesantren melalui upaya pembinaan dan pengembangan masyarakat.

Membangun dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia pada hakekatnya adalah membangun masyarakat. Yang perlu dipahami bahwa dalam suatu masyarakat yang sedang membangun tidak akan terjadi bahwa masyarakat semuanya menjadi berkualitas. Bisa saja hanya sebagian kelompok elitnya, tapi bisa juga sebagian besar. Sebagaimana dalam mobilitas sosial yang telah diungkapkan didepan bahwa bisa saja perpindahan lapisan sosial terjadi pada kondisi yang lebih tinggi, atau yang lebih bawah. Sehingga pemberian peran kelompok harus seimbang, namun tetap lebih menitik beratkan pada yang kurang berkualitas.

Saling memberi atau saling asih, asah dan asuh dalam suatu masyarakat yang sedang membangun adalah sangat penting artinya. Disinilah peran pimpinan baik formal maupun informal masyarakat termasuk para kyai dan ustadz, akan sangat membantu terciptanya usaha pengembangan dan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berarti terciptanya kualitas masyarakat.

E. Daftar Pustaka

- Bruinessen, M.V. 1992. Pesantren dan Kitab kuning; Pemeliharaan dan Kesenambungan Tradisi Pesantren, *Journal Ulumul Qur'an*, Vol. III, No. 4.
- Kemenag RI. 2012, *Statistik Pendidikan Islam*, Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ismail Pulungan. 2001. *Manajemen Mutu Terpadu*, Jakarta: Dirjen Dikti, Diknas.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Terj.). Jakarta: Gramedia.
- Mujamil Qomar. 2007. *Pesantren, dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga.
- Peter Burke. 2003. *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pradjarta, D. 1999. *Memelihara Umat: Kyai Pesantren Kyai Langgar di Pedesaan Jawa*. Yogyakarta LKIS.

Moh. Miftahusyain: Mobilitas Sosial Pesantren...

- Ritzer, George. 2002. *Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudardja Adiwikarta. 1988. *Sosiologi Pendidikan: Isu dan Hipótesis tentang Hubungan Pendidikan Dengan masyarakat*. Jakarta: Depdikbud.
- Yayuk Yuliati, Mangku Poernomo. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Ziemek, M. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.